



**KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA**

Pahlevi, Raden Mohammad Riezky

Dosen Prodi Sistim Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika

(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)

Abstract

The United States Foreign Policy towards the North Korean Nuclear Program to control, supervise and stop North Korea from producing nuclear. This is related to the position of the United States as the controller of international security and there is a national interest in the United States Government. This study aims to explain / describe the United States foreign policy towards the North Korean Nuclear Program. The data used are secondary data because international relations scientific research uses qualitative data. The data collection method used in this study is the literature of books, websites. Techniques of data analysis using qualitative analysis. The results of the study indicate that the United States Foreign Policy to reduce the North Korean Nuclear Program with Strategic Patience and the Deterrence Concept.

Keywords: *Foreign Policy, United States, North Korea Nuclear.*

Abstrak

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Nuklir Korea Utara untuk mengendalikan, mengawasi serta menghentikan Negara Korea Utara dalam memproduksi nuklirnya. Ini berkaitan dengan posisi Amerika Serikat sebagai pengendali keamanan Internasional dan ada kepentingan nasional pada Pemerintahan Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan/menggambarkan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Korea Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder karena penelitian keilmuan Hubungan Internasional menggunakan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur buku-buku, website.. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat untuk meredam Program Nuklir Korea Utara dengan Strategic Patience dan Konsep Deterrence.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Nuklir Korea Utara.

I. PENDAHULUAN

Nuklir Korea Utara bukanlah menjadi isu yang baru, melainkan sudah menjadi isu lama yang belum dapat terselesaikan. Masalah nuklir Korea Utara tersebut direspon oleh negara-negara di dunia Internasional salah satunya adalah Negara Amerika Serikat. Korea adalah sebuah Negara yang terletak dalam kawasan semenanjung di Asia Timur dan dikenal dengan nama Republik Demokratik Rakyat. Seung Yoon Yang & Mohtar Mas'ood (2016:5). Nuklir menjadi sarana Negara Korea Utara untuk bersaing di Dunia Internasional, Nuklir juga menjadi senjata mereka agar memiliki nilai dan power dalam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Meski banyaknya kecaman dari Dunia Internasional, mereka tetap menjalankan misi meningkatkan kekuatan Nuklir mereka sendiri. Negara Korea Utara juga beranggapan bahwa nuklir adalah cara mereka untuk dapat menghadapi Negara – Negara besar (Self Defense) yang sekiranya mengancam kedaulatan mereka, seperti contohnya Negara Jepang dan yang terutama Negara Amerika Serikat yang menganggap Korea Utara adalah negara Axis of Evil. Faktor utama yang membuat Negara Korea Utara

melakukan pengembangan nuklir adalah dengan melihat adanya sistem kekuasaan nasional yang bersifat bipolar antara Negara Amerika Serikat dan Negara Uni Soviet, serta eratnya hubungan diplomatik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang yang melatar belakangi Korea Utara memilih untuk bersekutu dengan Uni Soviet. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jepang semakin erat pada tahun 1965 juga merupakan faktor utama untuk Korea Utara mengembangkan senjata nuklir sebagai strategi deterens.

Dari segi eksternal, alasan Korea Utara tetap mengembangkan nuklir ialah intervensi yang dilakukan Amerika Serikat pada perang Korea yang menghalangi tujuan Presiden Kim Il Sung untuk menyatukan Korea. Dari segi internal dikarenakan Ideologi yang dianut oleh Korea Utara yang dikenal dengan *juche*. Kim Il Sung yang merupakan pemimpin pertama Korea Utara memperkenalkan ideologi tersebut sebagai ideologi resmi Korea Utara pada tahun 1950-an. *Juche* diartikan sebagai sebagai kepercayaan diri yang lebih luas lagi dipahami sebagai sikap mandiri. dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung negara lain. *Juche* merupakan inti dari pengawasan politik yang dimiliki Kim Il

Sung. Bahkan Pemimpin kedua, Kim Jong Il serta Kim Jong Un sebagai pemimping Korea Utara yang ketiga masih menggunakan ideologi *juche*. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan dari Luar Negeri agar dapat memenuhi kepentingan dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah perwujudan dari kepentingan nasional suatu negara, yang mana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai akan selalu berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negerinya. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan politik dan keamanan, sosial budaya juga ekonomi.

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari Presiden George W Bush kepada Presiden Barack Obama tahun 2009 lalu merupakan sebuah fenomena yang baru

pertama kali terjadi, karena untuk pertama kalinya kandidat presiden Amerika Serikat yang berasal dari kulit hitam ini mampu memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009. Presiden George Bush merupakan presiden yang berasal dari partai Republik sedangkan calon Presiden Barack Obama berasal dari partai Demokrat. Untuk itu sudah pasti kebijakan yang diambilpun berbeda. Kebijakan presiden George Bush terkenal dengan keras dan lebih mengedepankan militer sedangkan calon Presiden Barack Obama lebih mengedepankan diplomasi. Muna (2009 : 86-87).

Berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh tentara Sekutu (dimotori oleh Negara Amerika Serikat) telah membuka babak baru dalam sejarah politik Korea. Kemenangan tentara sekutu atas tentara Jepang merupakan akhir dari penjajahan Jepang terhadap bangsa Korea. Bercita-cita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat pasca pendudukan Jepang, bangsa Korea berada dibawah pengawasan negara-negara pemenang perang dunia II. Seung Yoon Yang & Mohtar Mas'oed (2016: 114). Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Negara Korea Utara menarik diri dari *Nuclear Non-Proliferation* (NPT) atau Perjanjian Non-

Proliferasi nuklir pada tahun 1993. Tindakan Korea Utara menarik diri dari NPT jelas menimbulkan reaksi dunia, khususnya Amerika Serikat. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan *International Atom and Energy Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak. Hal ini berbeda jauh dengan laporan Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas. Pada bulan Juli 2006, Korea Utara kembali meluncurkan *Taepodong-2* yang memiliki jangkauan tembak lebih jauh. Tindakan ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan juga negara-negara didunia. PBB kemudian memberikan sanksi embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara, yang dituangkan dalam Resolusi 1718 Tahun 2006. Dorongan dan tekanan dari sejumlah pihak untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara akan dianggap atau sama artinya dengan mengajak perang.

Pada tanggal 26 Mei 2009 dunia kembali dibuat gempar oleh uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Negara Korea Utara tersebut mengakibatkan terjadinya gempa dengan kekuatan 4,5 skala *richter*. Diperkirakan ledakan dahsyat tersebut dihasilkan dari peledak seberat 20 ton, yang setara dengan bom-bom Amerika yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan program nuklir Korea Utara itu merupakan ancaman besar terhadap perdamaian dunia. Uji coba nuklir ini telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718. Uji coba tersebut menuai kecaman dan kritik dari masyarakat internasional. Meskipun Tiongkok dan Rusia menyerukan agar Negara Korea Utara untuk kembali ke hasil kesepakatan perundingan enam negara, Korea Utara tetap mempertahankan ambisinya untuk mengembangkan senjata nuklir, yaitu pada tanggal 22 Juni 2016, Negara Korea Utara berhasil meluncurkan rudal darat jarak menengah *Musudan-1* ke ketinggian 1,413.7 kilometer (878.4 mi) dan dengan jangkauan 400 kilometer (250 mil). Serta pada tanggal 24 Agustus 2016, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam, *Pukkuksong-1* ke Zona

Identifikasi Pertahanan Udara Negara Jepang dengan jangkauan 500 kilometer (310 mil) dan ketinggian yang sama. Korea Utara tengah mengembangkan teknologi untuk dapat melakukan serangan kedua dengan menggunakan teknologi sistem peluncuran vertikal yang lebih baik dan roket berbahan bakar padat ([https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/](https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions) UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions diakses 3 Januari 2019). Pada saat pemerintahan Presiden Barack Obama memiliki ruang politik untuk melakukan dialog langsung dengan Negara Korea Utara, telah diputuskan untuk melakukan pendekatan yang oleh Menteri Luar Negeri Clinton gambarkan sebagai “*strategic patience in close consultations with our six party allies*” atau “kesabaran strategis dalam konsultasi erat dengan enam sekutu kami”. Penekanan pada konsultasi dan koordinasi telah menjadi prinsip pertama dari setiap keputusan kebijakan pemerintahan Obama terhadap Korea Utara, dan itu sangat dibantu oleh fakta bahwa Obama dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak telah melakukan pembicaraan empat mata dengan kesepakatan kepada prioritas dan pentingnya denuklirisasi Korea Utara.

Strategi Pemerintah Amerika Serikat dibawah Pemerintahan Presiden Barack Obama juga bersandar pada asumsi bahwa provokasi Negara Korea Utara akan mengakibatkan isolasi dan tertutup diri dari tetangga terdekatnya, tiap langkah tanpa melibatkan Negara Korea Utara tidak akan menghasilkan manfaat politik yang diperlukan dan bisa mengekspos pemerintah untuk resiko politik yang besar. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Robert Gates bahwa pemerintah “*tidak akan membeli kuda untuk ketiga kalinya*” untuk menunjuk kemungkinan perundingan nuklir AS dan mengingat kapasitas jangka pendek Korea Utara untuk lebih memperkuat kemampuan nuklirnya sebagian besar masih terkendali.

Kebijakan “*Strategic Patience*”, adalah kebijakan yang menyatakan bahwa Negara Amerika Serikat dapat menunggu Negara Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, sejalan dengan realitas politik atas kasus tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010. Namun setelah menurut analisis ilmuwan Universitas Stanford, Siegfried Hecker, upaya Negara Korea Utara untuk memperkaya uranium dan membangun

reaktor ringan telah menuju kepada keberhasilan, sehingga pemerintahan Obama mengadakan tiga kali pembicaraan secara langsung dengan Korea Utara pada Juli 2011 hingga Februari 2012. Upaya pemerintahan Presiden Barack Obama mengejar negosiasi bilateral dengan Negara Korea Utara merupakan usaha untuk memastikan bahwa perundingan bilateral tersebut tidak membuka kesalahpahaman.

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Korea Utara.”*

II. KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbeagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Perwita & Yani (2016 : 49). Plano

berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Plano dalam Perwita & Yani, (2016: 51). Kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu: 1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of orientation). Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah, dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. 2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitments to and a plan for action). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan

oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang atau tantangan dari luar negeri. 3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of behaviour). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para 46 pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Perwita & Yani (2016:53-55).

2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu: “kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup

rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara”. May Rudi (2015 : 116). Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejahteraan dan ekonomi. Plano & Olton (2014: 7). Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Karena konsep tersebut mencakup kelangsungan dan kelestarian suatu bangsa termasuk didalamnya kesatuan dan keutuhan teritorial, politik dan ekonomi, serta tercapainya taraf hidup yang lebih tinggi bagi populasinya. Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung sekiranya tercapai kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka

hubungan antarnegara. Adapun ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun Internasional.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Korea Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, website internet. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka peneliti ini hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, serta sumber lain yang valid dan terpercaya. Dimana dalam masalah tersebut, lalu

diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

IV. HASIL PENELITIAN

Pada tahun 2011 tingkat kekhawatiran Pemerintahan Amerika Serikat semakin meningkat pasca pergantian kepemimpinan Korea Utara. Ideologi Juche yang merupakan ideologi resmi Negara Korea Utara masih dianut oleh Kim Jong Un. Pemimpin Korea Utara yang merupakan anak dari Kim Jong Il yaitu Kim Jong Un lebih bersifat agresif. Kekuatan militer yang dimiliki oleh Korea Utara diperkirakan akan mampu menguasai Semenanjung Korea, bahkan Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un mengeluarkan kebijakan melakukan uji tembak rudal jarak pendek dekat pantai timurnya.⁸ Kegiatan uji coba rudal ini dilakukan tidak lain untuk dijadikan sebagai alat penawaran yang ingin ditukar dengan bantuan ekonomi dari Negara Amerika Serikat. Hal ini dilakukan pasca pemberhentian supply makanan yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat serta pembekuan bank perdagangan internasional Korea Utara pada tahun 2013. Alasan uji coba rudal ini juga ditujukan untuk memperoleh *bargaining position* Negara Korea Utara di Dunia Internasional.

Kebijakan Nuklir Kim Jong Un yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Desember 2011, Negara Korea Utara melakukan uji tembak rudal jarak pendek bertepatan pada saat kematian Kim Jong Il yang merupakan pemimpin kedua dari Korea Utara. Pada tanggal 13 Januari 2012 Korea Utara kembali melakukan uji tembak rudal jarak pendek sebanyak tiga kali ke Semenanjung Korea dan laut Jepang.

Terlepas dari pro dan kontra reaksi komunitas Dunia Internasional, bagi Korea Utara, uji coba nuklir ini merupakan bentuk diplomasi internasional untuk menyuarakan kepentingan nasional Negara Korea Utara agar didengar oleh komunitas Dunia Internasional. Korea Utara selama ini menghadapi sanksi ekonomi dari Pemerintahan Amerika Serikat, terasing dari dinamika Politik Internasional, dan mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan komunitas internasional. Di dalam negeri, Korea Utara dengan sistem Komunis yang dipimpin oleh Presiden Kim Jong Un dinilai oleh negara-negara Barat sebagai simbol diktator militer yang lebih agresif dari Kim Jong Il.

Tentu saja hal ini membuat Negara Korea Selatan yang merupakan tetangga langsung dari Korea Utara mengalami

“*security dilemma*” meskipun Pyongyang memberikan prioritas utama pada peningkatan kekuatan militernya, tetap saja Korea Selatan meminta bantuan Amerika Serikat agar terus berupaya untuk mencari cara agar bisa mengendalikan Korea Utara. Serta ancaman uji coba rudal tersebut mengancam pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Korea Selatan dan Jepang. Bahkan mengancam wilayah Amerika Serikat seperti Hawaii. Kegagalan yang dialami Negara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa kesepakatan mengenai program nuklir Korea Utara membuat Amerika Serikat merasa harus menerapkan cara diplomasi berbeda terhadap Pyongyang. Sikap dan perilaku Negara Korea Utara terhadap AS yang berubah-ubah membuat AS harus menerapkan kebijakan yang dapat menyesuaikan perilaku Korea Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negeri *Strategic Patience Approach* terhadap Korea Utara.

Kebijakan “*Strategic Patience*”, adalah kebijakan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat menunggu Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, selaras dengan realitas politik atas kasus tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan

terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010.

“*Strategic Patience*” Approach menurut Emma Chanlett-Avery, pakar hubungan luar negeri kawasan Asia, dan Ian E. Rinehart, analis hubungan luar negeri kawasan Asia, dalam *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, adalah kebijakan yang bertujuan untuk bernegosiasi terhadap Korea Utara dengan menerapkan dua cara pendekatan, yaitu:

- a. *Waits* atau kesabaran, yaitu usaha diplomasi terhadap Korea Utara untuk bernegosiasi dalam meja perundingan,
- b. Pemberian tekanan terhadap rezim Korea Utara. Unsur-unsur utama kebijakan tersebut didasarkan pada pemberian tekanan kepada Pyongyang untuk berkomitmen mengambil langkah menuju denuklirisasi, berkoordinasi erat dalam perundingan dan perjanjian dengan Jepang dan Korea Selatan, pendekatan terhadap Cina untuk mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara. Avery & Rinehart (2014: 6).

Kekuatan nuklir biasa diasosiasikan dengan konsep deterrence, tetapi penerapannya telah diperluas dalam berbagai situasi

dimana salah satu pihak mencoba mencegah pihak lain untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam. Para ahli strategi mengidentifikasi empat macam deterrence. James and Robert Manzi (2016:43) yaitu: 1. General Deterrence adalah suatu strategi yang dimaksudkan untuk mencegah keinginan lawan dengan segala jenis pertimbangan atas segala bentuk ancaman kepentingan negara lain. 2. Immediate Deterrence ialah suatu reaksi terhadap ancaman yang jelas dan tegas atas kepentingan negara lain. 3. Primary Deterrence dimaksudkan untuk suatu negara agar tidak menyerang negara lain. 4. Extended Deterrence ialah suatu strategi dengan cara mengintimidasi negara lain agar tidak menyerang negara sekutu dari suatu negara.

V. KESIMPULAN

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Korea Utara dengan melakukan kebijakan “Strategic Patience” dan dengan konsep deterrence”.

DAFTAR PUSTAKA

Avery, Emma C dan Rinehart, Ian E. 2014. *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*. U.S. State Department: Congressional Research Service (CRS) Report no. 7-5700.

Manzginrtior, James and Robert, Contending
Theories International Relations: A
Comperehensive Study (8th ed). 2016.
New York: Longman.

May Rudy, Teuku. 2015. *Teori, Etika, dan*
Kebijakan Hubungan Internasional.
Bandung: Angkasa.

Muna, Riefqi. 2009. Paradigma Pertahanan
dari *Hard Power* ke *Smart Power*.
Jakarta: Pusat Studi Pertahanan dan
Perdamaian FISIP Universitas Al Azhar
Indonesia. Vol. 5, no. 1.

Perwita B, Anak Agung dan Yani M, Yanyan.
2016. *Pengantar Ilmu Hubungan*
Internasi-onal. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Plano C. Jack dan Olton Roy. 2014.Kamus
Hubungan Internasional. Bandung:
Abardin.

Yang, Seung Yoon & Mohtar Mas'oed. 2016.
Sejarah Korea Sejak Awal Hingga Masa
Kontemporer. Gajah Mada University
Press.([https://www.armscontrol.org/AC](https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions)
[T/2016_07/News/ UN-IAEA-Denounce-](https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions)
North-Korean-Actions diakses 3 Januari
2019).